

BAB III

SETTING PENELITIAN

Peneliti melakukan *field research*, yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Bersifat deskriptif, memaparkan apa yang terjadi di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang



Gambar 1.2 : Foto Gedung PA dari Depan Jalan Raya
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan informasi dari web resmi pa-malangkota.go.id, Pengadilan Agama kota Malang terletak di Jln. Panji Suroso. Dibangun pada tahun 1984 dan mulai ditempati pada tahun 1985. Secara geografis, PA kota Malang ini terletak antara 705'-802' LS dan 1126'-127' BT. Batas wilayah kota Malang bagian utara yaitu kecamatan Singosari dan Sakis. Sebelah timur adalah kecamatan Pakis dan Tumpang. Bagian selatan yaitu kecamatan Tajinan dan Pakisaji. Bagian barat berbatasan dengan kecamatan Wagir dan Dau.



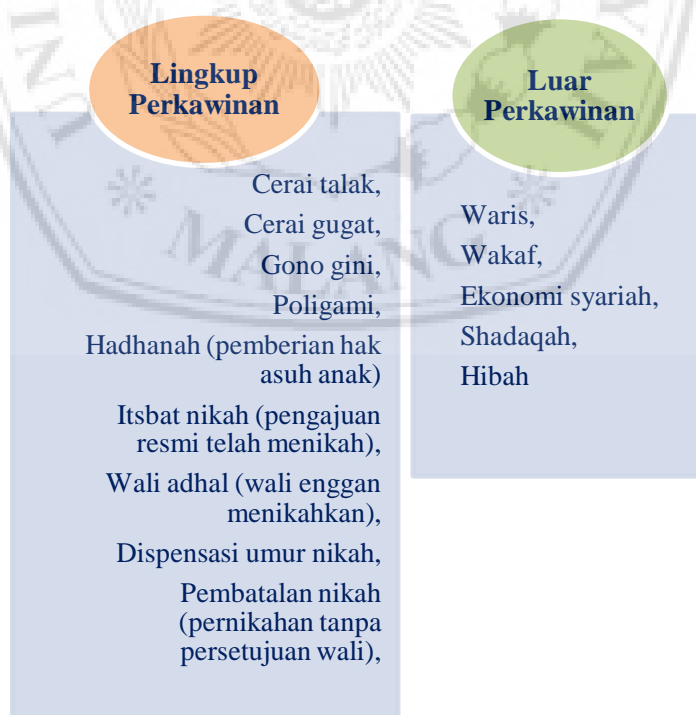




Sejak 29 Desember 2016 terdapat *standard operating procedure* yang berlaku dan wajib ditaati oleh para pihak dalam pelaksanaan mediasi. Pertama, hakim menunjukkan daftar mediator kepada para pihak untuk memilih mediator. Kedua, hakim menetapkan mediator yang telah disepakati. Ketiga, hakim menunda pelaksanaan persidangan. Keempat, mediator melaksanakan mediasi. Terakhir, mediator membuat laporan mediasi.

Adapun jenis perkara yang dimediasi antara lain cerai talak, cerai gugat, gono gini, poligami, itsbat nikah (pengajuan resmi telah menikah), wali adhal (wali enggan menikahkan), hadhanah (pemberian hak asuh anak), dispensasi umur nikah, pembatalan nikah (pernikahan tanpa persetujuan wali), waris, wakaf, ekonomi syariah, shadaqah, dan hibah. Khusus penelitian ini, maka peneliti hanya menganalisis perkara-perkara dalam lingkup perceraian.

Tabel 1.3 Klasifikasi Perkara



3.3 Tahap Penanganan Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan informasi dari *pa-malangkota.go.id* dan berdasarkan hasil observasi, maka syarat yang harus dipenuhi dan tahap penanganan atau pendaftaran kasus cerai adalah sebagai berikut :

3.3.1 Syarat yang Harus Dipenuhi :

1. Bagi orang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti tentang cara membuat surat permohonan/gugatan (tentang posita dan petitum), dan jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu minta petunjuk ke kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat Nikah dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.
2. Besaran jumlah uang muka (panjar) biaya perkara yang harus dibayar tergantung dengan banyaknya pihak-pihak yang terkait dengan perkara tersebut.
3. Permohonan/gugatan baru didaftar di kepaniteraan setelah Penggugat membayar uang muka (panjar) biaya perkara, yang besarnya telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama Malang.
4. Untuk perkara bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban/tanggungan pihak yang mengajukan permohonan/gugatan; Untuk perkara selain bidang perkawinan, biaya perkara menjadi beban / tanggungan pihak yang dikalahkan.

5. Bagi pemohon/penggugat yang tidak mampu, harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat, dan ia dibebaskan dari membayar biaya perkara.
6. Bagi yang buta huruf, bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk;

3.3.2 Tahap Penanganan (Prosedur) Berperkara

Cerai Talak

Cerai talak adalah permohonan (tidak seperti perkara permohonan pada umumnya yang bersifat *volunteer* karena Permohonan Cerai Talak ada “Lawannya”, yaitu Istri/ Termohon) yang diajukan oleh suami yang akan menceraikan isterinya.

Prosedurnya sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan;
2. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon), *posita* (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan), *petitum* (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan);
3. Alasan cerai harus mencakup setidaknya-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Isteri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama. Bila isteri berada di luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami.

Cerai Gugat

1. Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan; (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan);
2. Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari

diajukannya gugatan), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

3. Alasan cerai harus mencakup setidaknya-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
4. Gugatan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama/suami. Bila suami berada di luar negeri atau suami pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri.

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Asli Surat/ Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah (suami dan istri);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah 2 (dua) lembar;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat;
- d. Kartu Keluarga (bila ada);
- e. Akta Kelahiran Anak (bila ada)

Prosedur perkara gugatan dan permohonan lainnya, baik di bidang perkawinan maupun di luar bidang perkawinan (waris, hibah, wakaf, zakat,

shodaqoh dan ekonomi syariah) pada prinsipnya sama dengan prosedur pendaftaran perkara-perkara tersebut di atas.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan keterangan dari *mediasi.mahkamahagung.go.id*, setelah melakukan pendaftaran, langkah selanjutnya adalah pengadilan akan menentukan hari sidang pertama, dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan. Berdasarkan Pasal 17 PERMA 1/2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh Mediasi. Hakim tersebut juga akan memberikan penjelasan tentang Mediasi.

Setelahnya, para pihak wajib menandatangani Formulir Penjelasan Mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA 1/2016. Berdasarkan Pasal 24 (1) PERMA 1/2016, Para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa sehingga membantu mediator dalam proses mediasi.

Setelah mediator menetapkan hari mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) PERMA 1/2016. Berdasarkan

Pasal 27 PERMA 1/2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim, para pihak dapat meminta pencabutan gugatan, perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan mediasi sebagian.

Sebaliknya, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya, antara lain : waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai, tidak adanya itikad baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Tahap akhir, setelah mediator melaporkan hasil mediasi, selanjutnya yakni menunggu keputusan dari hakim mengabulkan gugatan atau tidak. Jika gugatan dikabulkan, maka penggugat dan tergugat resmi bercerai, dibersamai dengan dikeluarkannya akta cerai dari pengadilan.

3.4 Keadaan Geografi Kota Malang

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440–667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ – $112,07^{\circ}$ BT dan $7,06^{\circ}$ – $8,02^{\circ}$ LS. Kota Malang memiliki luas 110.06 Km² yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru. Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT. jumlah kelurahan tersebut dijabarkan sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah Kelurahan di Kota Malang Tahun 2017

Kec.	Klojen	Blimbing	Kedungkandang	Sukun	Lowokwaru
Kelurahan	Klojen	Blimbing	Kotalama	Ciptomulyo	jodipan
	Rampal celaket	Balearjosari	Mergosono	Gadang	Tunggulwulung
	Samaan	Arjosari	Bumiayu	Bandungrejo sari	Merjosari
	Kiduldalem	Purwodadi	Wonokoyo	Sukun	Tlogomas
	Sukoharjo	Polowijen	Buring	Tanjungrejo	Dinoyo
	Kasin	Pandanwangi	Kedungkandang	Pisangcandi	Sumbersari
	Oro-oro dowo	Purwantoro	Lesanpuro	Bandulan	Ketawanggede
	Bareng	Bunulrejo	Sawojajar	Karang besuki	Jatimulyo
	Gading kasri	Kesatrian	Madyopuro	Mulyorejo	Tunjungsekar
	Penanggungan	Polehan	Cemorokandang	Bakalan krajan	Mojolangu
	Kauman	Jodipan	Arjowinangun	Kebonsari	Tulusrejo
			Tlogowaru		Lowokwaru

Sumber : malangkota.go.id

3.5 Demografi Kota Malang

Berdasarkan data yang diperoleh dari *website* dispendukcapil, kota Malang tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 894.782 jiwa. Terdiri dari 446.561 penduduk laki-laki, dan 448.221 penduduk perempuan. Tersebar di 5 Kecamatan yaitu Blimbing 109.942 jiwa, Klojen 109.942 jiwa, Kedungkandang 209.229 jiwa, Sukun 206.298 jiwa, dan Lowokwaru 172.546 jiwa. Saat ini, kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Kedungkandang. Berikut adalah sebaran penduduk laki-laki dan perempuan di kota Malang :

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kota Malang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total (Laki&Perempuan)
1	Blimbing	98.305	98.462	196.767
2	Klojen	53.924	56.018	109.942
3	Kedungkandang	104.836	104.393	209.229
4	Sukun	103.470	102.828	206.298
5	Lowokwaru	86.026	86.520	172.546
J u m l a h		446.561	448.221	894.782

Sumber data : dispendukcapil.malangkota.go.id

3.6 Angka Perceraian

Cerai mati yaitu pasangan suami istri dimana salah satu pihak tersebut meninggal dunia dan belum menikah lagi. Cerai hidup yaitu pasangan suami istri yang memutuskan tali pernikahan dengan bercerai berdasarkan alasan-alasan. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), pasal 96 ayat 1 berbunyi apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pasal 97, janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Mediator dari AMIRPA & MMC selaku penyelenggara mediasi kasus perceraian di PA kota Malang melaporkan pada 2015, dari 554 berkas perceraian yang dimediasi, pasangan yang sepakat damai atau tidak bercerai berjumlah 15 pasangan, sisanya yakni 539 sepakat bercerai. Pada 2016, dari 500 berkas perceraian yang dimediasi, pasangan yang sepakat damai atau tidak bercerai berjumlah 24, sisanya yakni 476 sepakat bercerai. Pada 2017, dari 478 berkas perceraian yang dimediasi, pasangan yang sepakat damai atau tidak bercerai berjumlah 24, sisanya yakni 454 sepakat bercerai. Bagan di bawah menunjukkan angka perceraian tiga tahun terakhir cenderung menurun, namun jumlahnya masih sangat besar daripada sepakat damai.

Tabel 1.6 dibawah ini merupakan jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan dan jenis kelamin di kota Malang tahun 2016 dalam persen.

Tabel 1.6 Status Pernikahan Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Pernikahan	Jenis Kelamin		Rata-rata (L+P)
	Laki-laki	Perempuan	
Belum Menikah	41,70%	33,46%	37,58%
Menikah	54,97%	52,79%	53,88%
Cerai Hidup	1,23%	3,90%	2,6%
Cerai Mati	2,10%	9,84%	5,9%

Sumber : survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS), 2016
(BKKBN : jumlah penduduk kota Malang pada tahun 2016 berjumlah 887.443 jiwa)

Angka perceraian menurut hasil observasi di KUA yang tertera dalam laporan tahunan NTCR. Perceraian terbanyak terjadi di kecamatan Blimbing dibanding kecamatan lain. telah terjadi 67 cerai gugat dan cerai talak di kecamatan Blimbing. Perlu diamati bahwa jumlah data terjadinya perceraian dari PA dan KUA berbeda jauh. Menurut informasi yang diperoleh dari kepala KUA Blimbing, Drs. Abdul Afif. M.H, menyatakan bahwa hal itu terjadi karena PA kurang *update* atau berkirim data ke KUA.

3.7 Usia Perkawinan

Batas usia menikah pada calon mempelai suami dan istri telah pemerintah tetapkan dalam pasal 7 UU Perkawinan no.1 tahun 1974 dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Bunyi kedua pasal tersebut sama, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun). Seluruh KUA di kota Malang sudah menerapkan batas usia tersebut melalui tabel BP.1 'Laporan Usia Terjadinya Nikah'. Seluruh KUA menetapkan dalam tabel tersebut bahwa umur nikah maksimal calon suami yakni 35 tahun, sedangkan calon istri 30 tahun.

Terdapat 285 laki-laki menikah di kecamatan Klojen paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-30 tahun, sedangkan terdapat 288 jumlah perempuan menikah di kecamatan Klojen berada pada kisaran usia 17-20 tahun. Terdapat 542 laki-laki menikah

di kecamatan Sukun paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-30 tahun, sedangkan terdapat 673 jumlah perempuan menikah di kecamatan Sukun berada pada kisaran usia 17-20 tahun. Terdapat 470 laki-laki menikah di kecamatan Lowokwaru paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-29 tahun, sedangkan terdapat 367 jumlah perempuan menikah di kecamatan Lowokwaru berada pada kisaran usia 16-19 tahun. Terdapat 590 laki-laki menikah di kecamatan Kedungkandang paling banyak terjadi pada kelompok usia 19-25 tahun, sedangkan terdapat 635 jumlah perempuan menikah di kecamatan Kedungkandang berada pada kisaran usia 21-25 tahun. Terdapat 428 laki-laki menikah di kecamatan Blimbing paling banyak terjadi pada kelompok usia 25-30 tahun, sedangkan terdapat 464 jumlah perempuan menikah di kecamatan Blimbing berada pada kisaran usia 17-20 tahun.

Jika kedua atau salah satu dari calon mempelai ternyata masih dibawah umur 19 dan 16 tahun dalam hal penyimpangan ayat 1 tersebut, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita untuk meminta hal permintaan dispensasi kawin dengan cara kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai pemohon 1 dan pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para pemohon. Meskipun setelah mendapat dispensasi, tetap saja perkawinan tersebut disebut dengan pernikahan dibawah umur. Tak sedikit jumlah pernikahan dibawah umur terjadi kota Malang ini.

Kecamatan Sukun merupakan kecamatan dengan jumlah pernikahan dibawah umur terbanyak di kota Malang. Terdapat 104 pasangan dinyatakan masih dibawah umur. Urutan kedua terjadi di kecamatan Lowokwaru berjumlah 44 pasangan. Urutan ketiga terjadi di kecamatan Blimbing berjumlah 14 pasangan. Urutan keempat terjadi di kecamatan Kedungkandang berjumlah 11 pasangan, dan urutan terakhir terjadi di kecamatan Klojen berjumlah 1 pasangan.

3.8 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan

Berdasarkan informasi dari *bp4pekanbaru.or.id*, menyatakan bahwa BP.4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP.4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Secara terstruktur BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.

A. Visi dan Misi BP4

Adapun Visi dan Misi dari BP4 sebagai berikut: Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi.
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

B. Program-program BP.4

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya maka BP4 memiliki program-program organisasi untuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu:

- a) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
 - Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam keluarga
 - Kursus Calon Pengantin

- Pendidikan Konseling Untuk Keluarga
 - Pendidikan Remaja Usia Nikah
 - Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS
 - Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator permasalahan perkawinan.
 - Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- b) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga
- Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatatan perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
 - Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara- perkara di Pengadilan Agama
 - Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi
 - Melaksanakan advokasi terhadap berbagai kasus-kasus perkawinan di masyarakat
 - Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi, antropologi dan lain-lain.
 - Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
 - Menyelenggarakan konsultasi jodoh pada para pencari pasangan yang ingin melangsungkan hubungan rumah tangga

- Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronik lainnya
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga
- Menertibkan buku tentang berbagai kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.

c) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi

- Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya
- Penyuluhan & Pendidikan Keluarga Sakinah
- Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah
- Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

d) Bidang Advokasi dan Mediasi

- Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
- Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga
- Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.

e) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

- Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan/ BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan
- Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional
- Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia
- Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

